

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 TEORI FEMINISME LIBERAL

Teori feminisme liberal diperkenalkan oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* (1792). Wollstonecraft memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan moral yang setara, sehingga berhak untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Teori ini menekankan pentingnya penghapusan hambatan sosial dan hukum yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Dalam buku Tong yang berjudul *“Feminist thought”* (2004) menyatakan bahwa feminisme liberal bertujuan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang dapat menindas serta dapat memperjuangkan reformasi struktural supaya perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan.

Selain itu, menurut Wolf (1997:204) dalam bukunya yang berjudul *“Gegar Gender”*, sebagaimana dikutip (Rohtama & Murtadlo, 2018), disebutkan konsep-konsep utama dari feminisme liberal, salah satunya ialah gagasan tentang feminisme kekuasaan. Pandangan ini bertujuan untuk memperluas partisipasi perempuan dalam ruang sosial, politik, dan ekonomi dengan cara yang lebih terbuka dan inklusif. Ideologi feminisme kekuasaan tidak bersifat eksklusif atau kaku, tetapi tetap menekankan pendekatan yang menyeluruh terhadap kesetaraan gender.

Wolf juga menambahkan prinsip-prinsip feminisme kekuasaan bukanlah daftar tuntutan yang kaku, melainkan sebuah komitmen moral untuk dapat memperjuangkan unit-unit kekuasaan dasar yang seharusnya dimiliki oleh perempuan.

2.1.2 TEORI HUMAN CAPITAL

Teori Human Capital atau biasa dikenal sebagai teori modal manusia, pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz (1961) dan kemudian dikembangkan oleh Gary S. Becker (1964) dalam bukunya yang berjudul *“Human Capital: A*

Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education”. Teori modal manusia atau human capital berawal dari pemikiran bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi terhadap individu atau sumber daya manusia guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan dalam jangka panjang. Menurut Becker (1993:71) sebagaimana dikutip oleh Sukoco & Prameswari (2017) dikatakan bahwa manusia bukan sebagai input tenaga kerja, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, pendidikan perempuan memiliki peran penting sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama (Kuteesa et al., 2024). Pendidikan formal, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah perempuan, tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kritis serta memperkuat kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah publik ataupun domestik. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin besar peluang mereka untuk bisa masuk ke sektor formal, memperoleh pendapatan yang layak, dan juga berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, baik di tingkat keluarga ataupun masyarakat (McLaren et al., 2023).

Berdasarkan penelitian oleh Tokal et al., (2023) dikatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi serta peningkatan kebebasan ekonomi secara signifikan dapat menurunkan ketimpangan gender dalam jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan laporan UNESCO (2023) yang menegaskan bahwa perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah memiliki kemungkinan dua kali lipat untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi dibandingkan yang tidak menyelesaikannya.

2.1.3 TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Pertumbuhan inklusif (inclusive growth) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan bahwa pertumbuhan tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan

masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif menggabungkan aspek pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan kesempatan dalam akses terhadap sumber daya pembangunan.

Menurut Ianchovichina dan Lundstrom (2009), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang cepat, berkelanjutan, dan didukung oleh perluasan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pemerataan kesempatan sehingga individu, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi produktif.

OECD (2014) menegaskan bahwa pertumbuhan inklusif berupaya menciptakan kondisi ekonomi di mana setiap individu memiliki peluang untuk berkontribusi dan memperoleh bagian yang adil dari hasil pertumbuhan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesempatan kerja yang produktif, akses terhadap pendidikan, layanan dasar, dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

2.1.4 TEORI KEMISKINAN

Menurut Sen, definisi kemiskinan dapat dipandang dalam dua perspektif, yaitu relatif dan absolut. Dalam pandangan relatif, batas kemiskinan berubah mengikuti waktu, sedangkan dalam pendekatan absolut, batas kemiskinan dianggap tetap. Namun, Sen menegaskan bahwa kebutuhan dasar yang menjadi acuan garis kemiskinan absolut tidak bersifat statis sepanjang waktu (Sen, 1992). Artinya, baik definisi relatif maupun absolut pada dasarnya tidak benar-benar menetap, karena bahkan dalam pendekatan absolut, garis kemiskinan tetap dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu yang dapat berubah seiring waktu (Sen, 1983).

Kritik berikutnya menyoroti bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut perbandingan seseorang dengan orang lain, tetapi juga perbedaan absolut dalam kualitas hidup. Dengan kata lain, kemiskinan yang dialami seseorang secara absolut mungkin dipengaruhi oleh posisinya secara relatif di ruang sosial lainnya (Sen, 1983). Sen kemudian menegaskan bahwa aspek absolut dari kemiskinan adalah ketidakmampuan atau kekurangan kapabilitas, sedangkan aspek relatifnya

berkaitan dengan penyediaan barang atau pendapatan (Sen, 1985). Pada tahap ini, Sen memperkenalkan konsep kemiskinan yang berfokus pada penguatan kapabilitas sebagai inti utama. Baginya, kemiskinan bukan sekadar soal kepemilikan komoditas, tetapi tentang kebebasan nyata yang dimiliki seseorang untuk mencapai kehidupan yang dianggap bernilai (Sen, 1992).

Kapabilitas dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan yang memungkinkan seseorang memilih jenis fungsi hidup yang diinginkan. Kebebasan ini mencakup kemampuan untuk hidup layak, seperti memiliki kesehatan, pendidikan, pendapatan, serta lingkungan sosial dan ekologis yang baik (Callinicos, 2004). Berdasarkan hal tersebut, Sen (1983) menegaskan bahwa kapabilitas merupakan aspek absolut dari kemiskinan, sementara komoditas yang dibutuhkan seseorang untuk dapat berfungsi secara memadai bersifat relatif dan dapat berbeda antar masyarakat. Misalnya, kemampuan seseorang untuk tampil di ruang publik tanpa merasa malu sangat bergantung pada standar sosial tentang pakaian; di Inggris hal tersebut mungkin berarti memakai kemeja linen dan sepatu kulit, sedangkan di daerah lain dapat berarti jubah sutra dan sandal. Dengan demikian, Sen (2009) menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara pendekatan absolut dan relatif; keduanya saling berkaitan.

Analisis kemiskinan berbasis kapabilitas membantu mengungkap akar persoalan yang luas dan fundamental. Banyak faktor konversi tersebut juga mempengaruhi kemampuan individu mengakses dan memilih sumber daya sesuai kebutuhan dan nilai hidupnya. Sebagai contoh, penyandang disabilitas membutuhkan biaya lebih tinggi untuk mencapai kapabilitas yang sama dengan individu lainnya, namun memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh pendapatan (S., 2015). Hal serupa terjadi pada mereka yang hidup di wilayah rawan konflik, lingkungan geografis yang ekstrem, atau masyarakat dengan budaya diskriminatif, misalnya perempuan yang dilarang sekolah atau berpolitik (Rosadisastra, 2014). Dalam konteks demikian, memberikan bantuan pendapatan yang sama kepada semua orang adalah pendekatan yang keliru, dan membiarkan standar hidup diserahkan sepenuhnya pada norma lokal dapat mengabaikan

penderitaan tersembunyi yang lahir dari diskriminasi kelas sosial dan gender (S., 2015).

2.1.5 LANDASAN EMPIRIS

Landasan empiris merupakan bahan yang dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperkaya teori yang digunakan dengan variabel yang sama. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini disajikan secara ringkas pada Lampiran 1, yang memuat ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar pengembangan penelitian ini.

2.2 KERANGKA PENELITIAN

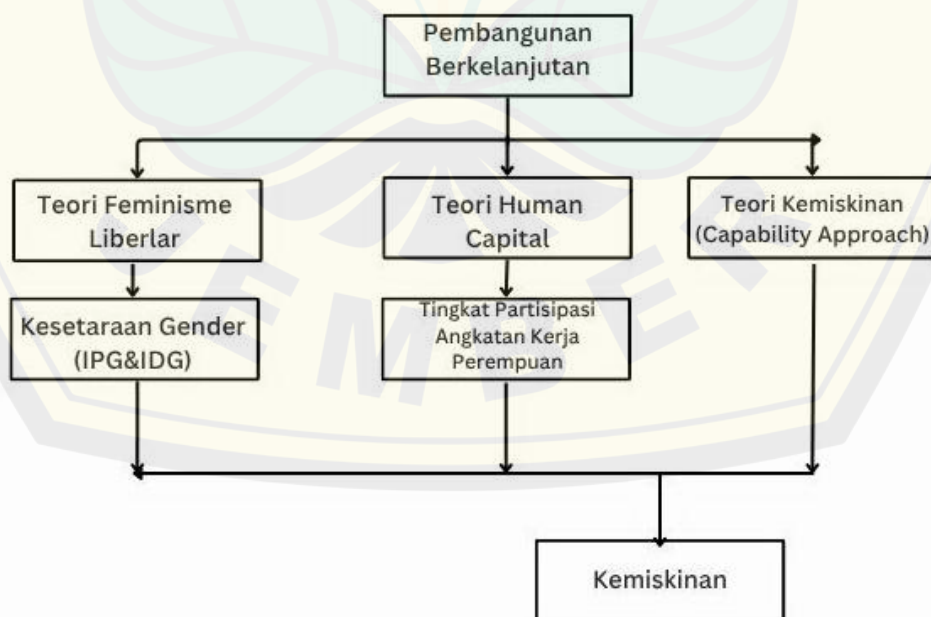
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan gender khususnya di Negara Indonesia. Kerangka konseptual ini dirancang untuk dapat menunjukkan hubungan antara ketimpangan tingkat pendidikan antar gender, partisipasi angkatan kerja perempuan, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Teori Feminisme Liberal, Teori Human Capital, dan Teori pertumbuhan ekonomi, dan Teori Kemiskinan.

Teori Kemiskinan yang dikemukakan oleh Amartya Sen (Capability Approach) mengatakan bahwa kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang tidak memiliki kebebasan dalam mencapai kehidupan yang bernilai. Maksudnya adalah kemiskinan tidak dapat dinilai dari seberapa besar pendapatan seseorang. Dengan kata lain teori yang dikemukakan oleh Sen disini berbicara mengenai nilai-nilai yang dapat diperoleh seseorang dalam kehidupannya, Sen mengelompokkan nya ke dalam beberapa kategori yaitu absolut dan relative. Kategori absolut disini mencakup hal-hal kebutuhan dasar diantaranya ada pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, dan tempat tinggal. Sementara untuk kategori relative diantaranya ada budaya, kondisi geografis, norma social, dan lingkungan social.

Teori Feminisme Liberal (Wollstonecraft, 1792) menekankan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai apabila laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara

dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Teori ini menjadi dasar utama yang melandasi seluruh variabel dalam penelitian ini, karena pada dasarnya ketimpangan gender berasal dari ketidaksetaraan akses dan peluang dalam berbagai bidang. Sementara itu, Teori Human Capital (Schultz, 1961; Becker, 1964) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi modal manusia guna meningkatkan partisipasi angkatan kerja, termasuk perempuan.

Selanjutnya, Teori Pertumbuhan Ekonomi inklusif menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur seberapa besar PDB yang dihasilkan melainkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi itu dapat dirasakan oleh setiap individu. Dalam teori ini ditekankan bahwa setiap individu ini tidak ada batasan gender antara laki-laki dan perempuan. Justru teori ini menekankan setiap kaum perempuan harus mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pertumbuhan ekonomi tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ianchovichina dan Lundstrom (2009), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang cepat, berkelanjutan, dan didukung oleh perluasan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pemerataan kesempatan sehingga individu, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi produktif.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang disusun berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, serta digunakan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Indeks Pembangunan Gender berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H₂ : Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H₃ : Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H₄ : Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H₅ : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H₆ : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan memediasi pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H₇ : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan memediasi pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.